

# Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Narasi Tirto.id

Friska Septiane Putri, Ratri Rizki K

Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

mdarmadiansyah.tanjung2@gmail.com, Arbaiyhsatriani@unisba.ac.id

**Abstract**— To reduce the rate of transmission of COVID-19, the Government of Indonesia has made a Large-Scale Social Restriction (PSBB-Pembatasan Sosial Berskala Besar) policy which is implemented in some regions in Indonesia. The government's policy in handling COVID-19 is considered to have news value as reported by the online media Tirto. The news about the PSBB policy in Tirto furthermore in the study of media texts not only conveys facts, but also has its way of presenting the social actors in it. For this reason, this study aims to determine the discourse of PSBB policy news in tackling COVID-19 in the online media Tirto.id. This study uses a critical paradigm, with a qualitative approach and critical discourse analysis methods. The primary data source is 6 news on PSBB policies on Tirto.id. Data collection techniques through documentation studies, interviews, and literature studies. The data analysis technique used Theo van Leeuwen's critical discourse analysis tools, namely exclusion (actor expenditure) and inclusion (actor inclusion). The data triangulation technique is done through source triangulation. The results of the study show that Tirto.id's news reports contradict President Joko Widodo's decisions in the PSBB policy, making it the main object of inclusion, and tends to provide rescue, whether intentional or not, to Anies Baswedan as the main actor of exclusion who has been considered a political opponent of Joko Widodo.

**Keyword**— *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Covid-19, Critical discourse analysis, Theo van Leeuwen, Online media Tirto.id*

**Abstrak**— Sebagai upaya menekan laju penularan COVID-19, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dinilai memiliki *news value* (nilai berita) sebagaimana juga diberitakan media online Tirto. Pemberitaan mengenai kebijakan PSBB di Tirto selanjutnya dalam kajian teks media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memiliki caranya sendiri dalam menyajikan aktor sosial di dalamnya. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 di media *online* Tirto.id. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis wacana kritis. Sumber data primernya yakni 6 berita kebijakan PSBB di Tirto.id. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan perangkat analisis wacana kritis Theo van Leeuwen yakni *exclusion* (pengeluaran aktor) dan

*inclusion* (pemasukan aktor). Teknik triangulasi data dilakukan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Tirto.id menunjukkan kontradiksinya pada keputusan-keputusan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan PSBB sehingga menjadikannya sebagai objek utama inklusi, dan cenderung memberikan penyelamatan baik disengaja atau tidak pada Anies Baswedan sebagai aktor utama eksklusif yang selama ini dinilai sebagai lawan politik kubu Joko Widodo.

**Kata Kunci**— *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Virus corona (Covid-19), Analisis wacana kritis, Theo van Leeuwen, Media online Tirto.id*

## I. PENDAHULUAN

Sejak virus corona atau COVID-19 (*Coronavirus Disease-19*) ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO- *World Health Organization*) sebagai pandemik, upaya penanganan COVID-19 di seluruh dunia menjadi lebih ditingkatkan, termasuk di Indonesia. Penyebaran COVID-19 juga terjadi di Indonesia, di mana penyebarannya setiap hari semakin meningkat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia menginformasikan bahwa hingga 27 April 2020 terdapat sebanyak 9.096 kasus positif COVID-19 di 288 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari total kasus tersebut sebanyak 78,93 persen di antaranya yakni sebanyak 7.180 pasien dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan masih dalam perawatan. Sementara mereka yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan kini masih menunggu hasil diagnosa dari tes, jumlahnya sebanyak 19.987 orang.

Angka kematian pasien COVID-19 juga belum berhenti bertambah. Setelah ada 22 kasus kematian baru dalam sehari terakhir. Total pasien positif COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia sampai dengan 27 April 2020 mencapai 765 jiwa (8,41 persen). Sedangkan total pasien positif COVID-19 di dalam negeri yang berhasil sembuh, mencapai 1.151 orang. Jumlah ini setara dengan 12,65 persen dari keseluruhan kasus positif yang sudah ditemukan Menanggapi rekomendasi WHO sebagai upaya untuk menekan laju COVID-19 yang begitu masif, pemerintah pusat Indonesia membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) per tanggal 31

Maret 2020, di mana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam hal pengawasan, media *mainstream*, dan media umum hendaknya dapat membantu pemerintah dengan cara memantau secara ketat setiap kebijakan dan langkah konkrit yang diambil pemerintah dalam memerangi COVID-19. Media massa khususnya yang berbasis *online* bahkan secara *realtime* memperbarui informasi terkait COVID-19 setiap saat, seperti yang juga dilakukan portal berita online Tirto.id. Media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat menjadi aktor otonom dalam proses politik. Dalam proses ini, hubungan media dan politisi, termasuk pemerintah di dalamnya dapat dipertimbangkan dalam hal perebutan kekuasaan untuk mempengaruhi agenda dan membuat kerangka mereka sendiri sebagai bagian dari cerita dalam upaya untuk mempengaruhi opini publik (McCombs, 2004: 12).

Pada studi analisis wacana, pengungkapan maksud-maksud media dapat dimaknai melalui analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Analisis wacana kritis berupaya menunjukkan dalam konteks manakah aktor sosial direpresentasikan sebagai *agents* (agen) dan yang sebagai *patients* (pasien), tetapi agensi sosiologis dari aktor tidak selalu diwujudkan oleh agensi linguistik dan peran gramatikal dari agen saja.

Untuk itu peneliti kemudian menggunakan analisis wacana kritis untuk lebih dapat memahami tentang peran aktor-aktor sosial yang ditampilkan dalam pemberitaan sebagai bagian dari proses dominasi kuasa media. Analisis wacana kritis berupaya untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana yang kemudian dikelompokkan sebagai aktor sosial. Aktor sosial tersebut dapat berupa individu maupun kelompok dominan yang memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus menerus sebagai objek pemaknaan, dan digambarkan secara buruk.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis mencoba untuk menguraikan “Bagaimana wacana pada berita kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menanggulangi COVID-19 di media *online* Tirto.id?”. Yang penulis uraikan dalam pokok-pokok bahasan seperti berikut:

1. Bagaimana proses eksklusi yang dilakukan Tirto.id guna menghilangkan aktor sosial pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19?
2. Bagaimana proses inklusi yang dilakukan Tirto.id guna menampilkan aktor sosial pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19?
3. Mengapa Tirto.id melakukan eksklusi dan inklusi pada aktor-aktor sosial tertentu pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19?

## II. LANDASAN TEORI

Salah satu cara mendefinisikan kekuatan media yakni sebagai label untuk menunjukkan adanya hasil akhir dari upaya pengorganisasian sumber daya masyarakat sehingga sektor media memiliki daya tawar independen yang signifikan terhadap sektor-sektor utama lainnya (seperti bisnis besar, elit politik, elit budaya, dan sebagainya) sebagaimana diungkapkan Couldry & Curran (2003: 3) bahwa media bergantung pada “konten” yang dihasilkan oleh orang lain atau setidaknya mereka melakukannya melalui salah satu interpretasi dari penyebaran cerita selebriti dan liputan “realitas” di media Amerika Serikat dan Eropa bahwa kenaikan biaya ekonomi dari produksi berita telah memaksa media untuk menghasilkan cerita mereka sendiri. “Isi” dan perlakuan yang dibuat tersebut seolah-olah itu realitas “eksternal”.

Pada kenyataannya kuasa media tidak menjadikan interaksi antara politik, warga negara dan media - setidaknya di permukaan - tidak sepenuhnya harmonis, di mana partai-partai politik pada hakekatnya tidak memiliki anggota, komunikasi secara profesional, dan manajemen berita yang menggelar panggung politik di depan referensi diri yang semakin sinis dan mandiri sebagaimana diungkapkan de Vreese (2007: 6) tentang sekelompok jurnalis yang digerakkan oleh kekuasaan yang bekerja di perusahaan besar yang dikendalikan secara komersial, dimiliki oleh sejumlah kecil konglomerat yang menawarkan informasi politik pada publik. Ekonomi politik pada dasarnya mempelajari mengenai adanya hubungan kekuasaan dalam segala aspek yang menurut Mosco (2009: 127) ekonomi politik menurut adalah mempelajari tentang hubungan-hubungan sosial, terutama hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber- sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk di dalamnya sumber- sumber yang terkait dengan komunikasi.

Etika media merupakan bagian dari tata cara media dalam bersikap yang diungkapkan Straubhaar et, al (2012 : 496) sebagai ketentuan etika komunikasi yang diterapkan guna menjaga sikap dalam berbagai aktivitas pelaku media yang mungkin bisa menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain. Sikap ini kemudian itu ditunjang melalui pandangan etika jurnalisisme yang diungkapkan Straubhaar et, al (2012: 496) ditetapkan pada beberapa perhatian mengenai komunikasi media yang akurat dan penuh kejujuran, berimbang dan bertanggungjawab dalam tindakan, menjaga privasi bagi subjek-subjek yang ada dalam layanan informasi, dan menghormati segala bentuk hak kekayaan intelektual atau ide dari pihak lain.

Hafez (2002: 228-241) kemudian menjelaskan mengenai persyaratan yang dibutuhkan dalam etika jurnalisisme media sebagai berikut:

1. *Truth and Objectivity* (Kebenaran dan Objektivitas)
2. *Privacy and Publicness* (Ranah pribadi dan ranah public).

3. *Freedom* (Kebebasan)4. *Internationalism* (bersifat internasional)

Analisis wacana melihat bahasa sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan. Wacana kritis kemudian hadir dalam mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara histories maupun institusional. Analisis wacana berpusat pada kekuatan produksi makna, di mana makna diproduksi seperti halnya media dalam mewacanakan fakta berita yang di dalamnya memasukan prose produksi dan reproduksi makna, sebagaimana diungkapkan Eriyanto (2008: 6) bahwa analisis wacana kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Strategi Penyajian Aktor Pada Berita Tirto.id Edisi 20 April 2020*

Judul Berita : Buruh masih berangkat kerja saat PSBB, Pemerintah harus apa?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan penyebaran COVID-19. Imbasnya sejumlah aktivitas industri dan perkantoran diwajibkan beroperasi terbatas agar upaya ini bisa berhasil.

Selama lima hari, sejumlah pabrik yang harus menghentikan sementara aktivitasnya masih beroperasi normal. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat, setidaknya ada 9 pabrik di kawasan industri Pulogadung yang masih beroperasi. Sementara di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, sebagian besar pabrik garmen masih memproduksi. Gubernur Anies Baswedan sebenarnya telah mengingatkan soal adanya sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar PSBB. Sebab, meski sudah berjalan hampir sepekan, kepadatan penumpang di angkutan umum hingga jalan-jalan menuju pabrik tidak terhindarkan.

Namun, upaya ini nampaknya bakal berbenturan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian yang membolehkan sejumlah pabrik—di luar kriteria yang ditetapkan Pemprov DKI— tetap beroperasi.

B. *Strategi Penyajian Aktor Pada Berita Tirto.id Edisi 23 April 2020*

Judul Berita : Buruh masih berangkat kerja saat PSBB, Pemerintah harus apa?

Pemerintah resmi melarang mudik atau pulang kampung 2020 dengan dasar pencegahan sebaran COVID-19. Keputusan tersebut juga berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan yang menyatakan 24 persen responden berniat mudik meski telah diimbau untuk tidak. Azhar, sanksi apa pun itu pada dasarnya akan sulit diterapkan dalam wilayah yang menerapkan PSBB.

Ia berkaca pada situasi daerah-daerah yang telah menerapkan PSBB saat ini. Sementara Ketua Bidang

Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur tidak sepakat jika para pelanggar mudik dikenakan sanksi. Larangan mudik ini bisa dibilang terlambat, meski itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Disebut terlambat karena sudah banyak warga yang kadung mudik. Dalam rapat terbatas 30 Maret lalu, Jokowi mengaku mendapatkan laporan dalam 8 hari terakhir sudah ada sekitar 14 ribu warga Jabodetabek pulang kampung.

C. *Strategi Penyajian Aktor Pada Berita Tirto.id Edisi 11 Mei 2020*

Judul Berita : Buruh masih berangkat kerja saat PSBB, Pemerintah harus apa?

McDonald's Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat dipadati orang-orang pada Minggu, 10 Mei 2020 malam karena kawasan Sarinah akan direnovasi sebagaimana disiarkan langsung Akun Instagram @Mcdonaldsid. Kerumunan orang di McDonald's Sarinah menjadi masalah karena saat ini DKI Jakarta tengah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kasus ini juga membuktikan betapa lemahnya langkah-langkah preventif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menegakkan PSBB. Pasalnya, sejak beberapa hari lalu, sudah tersiar kabar jika McDonald's Sarinah akan ditutup dan menimbulkan reaksi warganet. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah penegakan PSBB akan semakin terlihat loyo jika aparat tidak memberikan sanksi tegas terhadap McDonald's.

D. *Strategi Penyajian Aktor Pada Berita Tirto.id Edisi 23 Mei 2020*

Penyebaran COVID-19 di Indonesia masih merajalela. Pada 21 Mei lalu, penambahan kasus harian bahkan mencatatkan angka tertinggi, yakni 973 kasus. Sehari kemudian, per 22 Mei 2020, sudah ada 20.796 orang positif terinfeksi virus yang menyerang saluran pernapasan ini. 5.057 di antaranya sembuh dan 1.326 lain meninggal dunia. Di tengah kurva yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai ini, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk mulai berdamai dengan Corona. WHO sebelumnya telah menetapkan 6 prasyarat sebelum sebuah negara melakukan pelonggaran pembatasan sosial. Indikator-indikator prasyarat tersebut yang belum tampak di Indonesia. Seperti halnya kapasitas fasilitas kesehatan, misalnya, masih rendah. Di sisi lain, tekanan dari sisi ekonomi sudah mengencang. Narasi pemerintah, PSBB dengan segala rupa pengetatan aktivitas bisnis dianggap biang keladi lesunya ekonomi saat ini. Atas dasar itulah menurutnya pemerintah memunculkan usulan relaksasi PSBB, meski menurut para pakar kesehatan itu adalah bumerang yang membuat akhir pandemi semakin tak terlihat.

E. *Proses Ekskusi Tirto.id Guna Menghilangkan Aktor Sosial*

Proses eksklusif yang dilakukan Tirto.id guna menghilangkan aktor sosial pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 terbentuk dengan sifat kesengajaan atau tidak pada saat proses pembuatan berita, karena menghilangnya subjek inti pemberitaan dapat terjadi ketika kepercayaan wartawan akan peristiwa tersebut memiliki keterikatan subjektif. Artinya wartawan memiliki ideologi tersendiri mengenai arah pemberitaan yang diinginkannya. Bukan berarti bahwa wartawan tersebut tidak memberitakan peristiwa faktual, hanya saja cara pengemasan fakta-fakta tersebut akan menunjukkan nilai-nilai keberpengaruhannya.

Pada proses eksklusif ini, peneliti mencoba untuk dapat memetakan konsep pemberitaan berdasarkan pemaparan wartawan dalam teks berita sebagai suatu acuan yang menunjukkan jalan keberpihakan. Keberpihakan dalam proses eksklusif ini ditunjukkan dalam teks berita untuk mengeluarkan seseorang atau kelompok dengan cara-cara tertentu.

#### *F. Proses Inklusi Tirto.id Guna Menampilkan Aktor Sosial*

Proses inklusi dalam wacana kritis Van Leeuwen ini dapat dilakukan melalui berbagai cara penyajian berita, seperti dilakukan melalui tujuh strategi yakni **diferensiasi**-indiferensiasi, objektivasi-**abstraksi**, nominasi-**kategorisasi**, nominasi-**identifikasi**, **determinasi**-indeterminasi, **asimilasi**-individualisasi, **asosiasi**-disosiasi. Beragam cara penyajian berita yang ditujukan untuk dapat menampilkan subjek tertentu dalam berita dapat memberikan beragam alternatif pemahaman bagi peneliti dalam menilai maksud wartawan dengan memasukan subjek tertentu dalam beritanya.

#### *G. Alasan Tirto.id Melakukan Eksklusif dan Inklusi Pada Aktor Sosial*

Alasan Tirto.id melakukan eksklusif dan inklusi pada aktor-aktor sosial tertentu pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 utamanya tentu terkait dengan adanya arah keberpihakan, dukungan, netralitas dan independensinya.

Alasan Tirto.id melakukan eksklusif pada aktor-aktor sosial tertentu pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 kemudian menunjukkan adanya keberpihakan pada empat aktor sosial yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah DKI Jakarta, masyarakat yang melakukan mudik pada waktu pelarangan mudik oleh pemerintah pusat, dan Kepala daerah penyelenggara PSBB yang dinilai tidak efektif dalam menjalankan PSBB di daerahnya.

Kemudian alasan Tirto.id melakukan inklusi pada aktor-aktor sosial tertentu pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 menunjukkan adanya upaya untuk melegitimasi, mengucilkan atau memarjinalkan karena adanya keberpihakan media pada salah satu pihak sehingga pihak lainnya dapat dirugikan. Inklusi pun dilakukan Tirto dengan memasukan beberapa

aktor sosial antara lain Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat, Kementerian Perindustrian mewakili pemerintah pusat, masyarakat Indonesia, Kawasan Industri sekitar DKI Jakarta, sejumlah pabrik dan sebagian besar pabrik garmen, industri kendaraan roda dua di kawasan Jakarta Utara, pengunjung penutupan McDonald's Sarinah, pengelola McDonald's, hingga aparat keamanan yang dilibatkan pada pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, wacana pada berita kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menanggulangi COVID-19 di media *online* Tirto.id diketahui melalui dua proses utama sebagaimana disimpulkan berikut:

1. Proses eksklusif yang dilakukan Tirto.id guna menghilangkan aktor sosial pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 dilakukan melalui dua strategi yakni nominalisasi dan penggantian anak kalimat. Kedua strategi tersebut dilakukan untuk mengeluarkan empat aktor sosial yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah DKI Jakarta, masyarakat yang melakukan mudik pada waktu pelarangan mudik oleh pemerintah pusat, dan Kepala daerah penyelenggara PSBB yang dinilai tidak efektif dalam menjalankan PSBB di daerahnya.
2. Proses inklusi yang dilakukan Tirto.id guna menampilkan aktor sosial pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 dilakukan melalui enam strategi yakni asimilasi, identifikasi, abstraksi, asosiasi, diferensiasi, dan kategorisasi. Keenam strategi tersebut dilakukan untuk memasukan beberapa aktor sosial antara lain Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat, Kementerian Perindustrian mewakili pemerintah pusat, masyarakat Indonesia, Kawasan Industri sekitar DKI Jakarta, sejumlah pabrik dan sebagian besar pabrik garmen, industri kendaraan roda dua di kawasan Jakarta Utara, pengunjung penutupan McDonald's Sarinah, pengelola McDonald's, hingga aparat keamanan yang dilibatkan pada pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.
3. Alasan Tirto.id melakukan eksklusif dan inklusi pada aktor-aktor sosial tertentu pada berita kebijakan PSBB dalam menanggulangi COVID-19 menunjukkan bahwa eksklusif utamanya merujuk pada Kepala Daerah penyelenggara PSBB yang tidak efektif dilatarbelakangi adanya koordinasi yang tidak jelas antara pusat dan daerah, di mana Kepala daerah tersebut utamanya menyelamatkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas alasan kegagalan pelaksanaan PSBB DKI Jakarta sebagai hasil dari ketidaktegasan pihak-pihak bawahan Anies Baswedan dan buruknya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan inklusi utamanya utamanya menunjukkan kebijakan

Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat yang terkesan tarik ulur dan kurang tegas dalam pelaksanaan PSBB. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Joko Widodo beserta jajaran bawahannya di pemerintahan pusat juga memicu masyarakat dan para pelaku industri melanggar ketentuan PSBB. Eksklusi dan inklusi pada pemberitaan Tirto tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan politik yang menarik perhatian pembaca dalam keterkaitannya dengan ekonomi politik media. Di mana Tirto banyak menunjukkan kontradiksinya pada keputusan-keputusan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan PSBB, dan cenderung memberikan penyelamatan baik disengaja atau tidak pada Anies Baswedan yang selama ini dinilai sebagai lawan politik kubu Joko Widodo. Anies yang dikelurkan dalam pemberitaan (eksklusi) pun diuntungkan dari pemberitaan Tirto, terlebih Anies digadang-gadang sebagai calon presiden yang mempersiapkan segala strategi politiknya termasuk memanfaatkan momentum COVID-19 sebagai bagian dari langkah politiknya, sehingga banyak kebijakan Anies yang bersebrangan dengan Joko Widodo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya. 2005. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (cetakan kedua). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [2] Bungin Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi: teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (cetakan ketiga). Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Chomsky, Noam. 2006. *Politik Kuasa Media*. Yogyakarta: Pinus Book Publisier.
- [4] Couldry, Nick & Andreas Hepp. 2017. *The Mediated Construction of Reality*. Cambridge & Malden: Polity Press & James Curran. 2003. *Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World*. Lanham & Oxford: Rowman & Littlefield Publisher inc.
- [5] Denzin, Norm K & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (terj. Dariyatno; Badrus Samsul Fata; Abi; John Rinaldi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Eriyanto. 2008. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (cetakan keenam). Yogyakarta: LKiS.
- [7] Mosco, Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication (2nd Edition)*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- [8] Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian* (cetakan kesembilan). Bogor: Ghalia Indonesia.
- [9] van Leuween, Theo. 2008. *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. New York: Oxford University Press, inc.
- [10] Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Cet. keenam). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [11] Dashti, Laleh & Saeed Mehrpou. 2017. Representation of Social Actors in J. Krishnamurti and Alan Watts' Philosophical Speeches: A Critical Discourse Analysis. *Journal of Applied Linguistics and Language Research*, Vol. 4, Issue 4, pp.51-59.
- [12] de Vreese, C. H. 2007. No News Is Bad News! The Role of The Media and News Framing in Embedding Europe. *WRR:*

*Scientific for Government Policy - Web Publications* 20, The Hague, June 2007, pp. 1-44.

- [13] Maghvira, Genta. 2017. Analisis Wacana Kritis Pada pemberitaan Tempo.co tentang kematian Taruna STIP Jakarta. *Jurnal The Messenger*, Vol. 9, No. 2, Edisi Juli 2017, pp.120-130.
- [14] Pahdepie, Fahd. 2014. Media as the Battleground for Politics: The Relation between Politicians and Media Barons in Indonesian Politics. *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 02, No.02, 2014, pp. 1-10.
- [15] Rachman, Andhita & Sofi Yuniarti. 2017. Critical Discourse Analysis in Donald Trump Presidential Campaign to Win American's Heart. *TELL Journal*, Vol. 5, No. 2, September 2017, pp.8-17.
- [16] Sari, Ratna; Silvia Eka Putri; Herdi & Budianto Hamuddin. 2018. Bridging Critical Discourse Analysis in Media Discourse Studies. *Indonesian EFL Journal*, Vol.4, No.2, pp.80-89.